

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, R., et al. (2022). Sistem Penggajian dan Administrasi Perpajakan Perusahaan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. (2024). Profil dan Layanan BBPOM di Padang. Diakses dari <https://padang.pom.go.id/layanan>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control – Integrated Framework. New York: AICPA.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Perubahan Regulasi Perpajakan dan Administrasi Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Perubahan atas PER-2/PJ/2024 tentang Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, E. (2025). Dasar-Dasar Perpajakan. Pekanbaru: Unri Press.
- Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.